

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, R H, and A Mutalib. *Hukum Acara Pidana*. Selat Media, 2023.  
<https://books.google.co.id/books?id=YMPQEAAAQBAJ>.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2016. [https://books.google.co.id/books?id=Clc\\_DwAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ).
- Endri, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*. Prenada Media, 2024.  
<https://books.google.co.id/books?id=vrkFEQAAQBAJ>.
- H. Moh. Askin and Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.  
<https://books.google.co.id/books?id=qDDZEAAAQBAJ>.
- Joel, C. *Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Covid-19 Dan Umu*. Guepedia, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=l6AbEQAAQBAJ>.
- Kristiawanto, *Sistem Peradilan Pidana (Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, 2024.  
<https://books.google.co.id/books?id=FG4pEQAAQBAJ>.
- Suyanto and U Press. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.  
<https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>.
- Waluyo, B. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.  
<https://books.google.co.id/books?id=723dEAAAQBAJ>.
- Wharton's Pocket Law Dictionary*. Universal Law Publishing, n.d.  
<https://books.google.co.id/books?id=JZ7GlfI8UToC>.

### B. JURNAL

- Aisy Nabila Inzirah, Jumaidi, herlinda Aneta Agusmila Sri. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara," n.d., 102–13.
- Arfa, Nys., Yulia Monita, and Erwin Erwin. "Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas

- II B Jambi)." PAMPAS: Journal of Criminal Law 5, no. 2 (2024): 233–41. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33808>.
- Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 3 (2021): 12–30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Di Lapas Kelas IIB Siborongborong." Braz Dent J. 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Cahyani, Ana Indah, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar. "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 2 (2021): 176–92. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." Jurnal Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 225–34. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>.
- Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Law Review 19, no. 3 (2020): 246. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>.
- Hak, Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan, and Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. "Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan." Jurnal Hukum Pidana Dan ..., no. 969 (11AD): 16.
- Igo, Mahyudin, Amiruddin Amiruddin, and Ufran Ufran. "Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara." Jurnal Education and Development 10, no. 2 (2022): 707–13. <https://www.neliti.com/publications/562728/kebijakan-formulasi-dalam-ruu-kuhp-terhadap-pidana-kerja-sosial-sebagai-alternat#cite>.
- Ilahi, M. Alvi Rizki, Elly Sudarti, and Nys. Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 2 (2021): 125–39. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>.
- Islamy Yolanda, Rusmiati Elis, Chandra Magdalena Erika. "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019."

Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1 (2022): 1–15.

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 26. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.

Karunia. “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP” 4, no. June (2016): 2016.

lailatul masruroh, rahmatul hidayati, dan budi parmono. “Upaya Penanggulangan Terhadap Dampak over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Malang).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022, 5–24.

Maulana, Aby. “Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia.” *Varia Justicia* 13, no. 2 (2017): 65–81. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881>.

Muhammad Ridwansyah. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278.

Mushaddiq, Akmal. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juridical Review of Social Work Penalties as an Alternative to Imprisonment in Law Number 1 Of” 8, no. 1 (2024): 80–88. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/31048>.

Mustafa, La Ode, and Universitas Halu Oleo. “Evaluasi Kinerja Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Narapidana Di Rutan Kelas Ii a Kendari” 1, no. 3 (2024): 116–27.

Nababan, Monica Dwi Putri, and Khabib Nawawi. “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan).” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 79–95. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8286>.

Novita Eleanor, Francisca. “VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020 PIDANA PENJARA DAN HAK-HAK ANAK” 4, no. 2 (2020): 58–71.

Parera, HMDKT. “Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis Dan Perbandingan Hukum Pidana.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4

- (2024): 2309–24. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10763%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/10763/7425>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Rukmi, S. “Prospek Pidana Kerja Sosial Di Indonesia.” *Wacana Hukum* VII, no. 1 (2012): 75–89.
- Saputra, Satria Nenda Eka, and Muridah Isnawati. “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 52–70. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>.
- Slat, Teafani Kaunang. “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 352. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p352-360>.
- Susim, Selfina. “Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan Kuhp.” *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 225–34.
- Susylawati, Eka. “Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2019): 212–25. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2564>.
- Sutrisni, Ni Komang, and Nengah Susrama. “Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023): 408–19.
- Wibawa, Iskandar. “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105–14. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>.
- Wijaya, Tubagus Heru Dharma. “Penerapan Sanksi Sosial Sebagai

Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime).” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 371. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.371-404>.

Yustia, Rd. Dewi Asri, Gialdah Tapiansari Batubara, and Tia Ludiana. “Implementasi Model Pidana Kerja Sosial Berbasis Nilai-Nilai Hukum Adat Sunda.” *Litigasi* 22, no. 2 (2021): 272–86. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4526>.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

### **D. WEBSITE**

CNN Indonesia. “Yasonna Ungkap Lapas Dan Rutan Over Kapasitas 89 Persen,” 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240612181117-12-1109140/yasonna-ungkap-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-89-persen>.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM. “Pelajari Implementasi Sanksi Alternatif, Dirjen Badilum Hadiri Diskusi Dengan Ditjen Pemasyarakatan,” 2024. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4247-pelajari-implementasi-sanksi-alternatif-dirjen-badilum-hadiri-undangan-diskusi-ditjen-pemasyarakatan.html>.

SDP PUBLIK. “Jumlah Penghuni,” 2024. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. “Pasal-Pasal KUHP,” 2016. <https://www.ksap.org/sap/pasal-pasal-kuhp/>.